



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4448-4455

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Peran Pemerintah dan Kebijakan Pendidikan Perbandingan dengan Negara Lain

Tri Rahayu Setya Ningrum, Yoni Edwar, Ari Isnu Wibowo, Sularni, Adi Asmara, Kashardi

Program Studi Magister Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[triniringrum02@guru.sma.belajar.id](mailto:triniringrum02@guru.sma.belajar.id), [yoniedwar15@guru.sma.belajar.id](mailto:yoniedwar15@guru.sma.belajar.id), [ari.isnu.wibowo@gmail.com](mailto:ari.isnu.wibowo@gmail.com), [larni9502@gmail.com](mailto:larni9502@gmail.com),  
[adiasmara@umb.ac.id](mailto:adiasmara@umb.ac.id), [kashardi@umb.ac.id](mailto:kashardi@umb.ac.id)

### Abstrak

*Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat pada abad ke-21 menuntut setiap negara untuk memperkuat kebijakan pendidikan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif, kompetitif, dan literat teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah dalam kebijakan pendidikan melalui perspektif perbandingan internasional dengan mengkaji model kebijakan di negara maju dan berkembang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang menghimpun sumber ilmiah dari jurnal, buku, laporan internasional, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola kebijakan, efektivitas implementasi, serta praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maju seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura berhasil membangun sistem pendidikan berkualitas melalui tata kelola yang konsisten, profesionalisasi guru, pendanaan berbasis kebutuhan, serta integrasi digital yang kuat. Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia dan India masih menghadapi tantangan kesenjangan pendidikan, keterbatasan infrastruktur, dan variasi kualitas guru. Meskipun Indonesia telah melaksanakan reformasi melalui Kurikulum Merdeka, digitalisasi sekolah, dan program peningkatan kompetensi guru, implementasinya belum merata. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat tata kelola pendidikan, meningkatkan pemerataan kualitas guru, memperluas infrastruktur digital, serta memperkuat kolaborasi multisektor untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan kompetitif secara global. Studi ini memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan kebijakan pendidikan nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan.*

*Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Peran Pemerintah, Perbandingan Internasional, Kurikulum Merdeka, Tata Kelola Pendidikan*

### 1. Latar Belakang

Sistem pendidikan global terus mengalami perubahan signifikan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi pada abad ke-21. Transformasi digital, meningkatnya kompetisi global, serta tuntutan keterampilan abad 21 mendorong negara-negara untuk mengevaluasi kembali kebijakan pendidikan mereka agar relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman (UNESCO, 2021). Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki peran krusial dalam merumuskan arah kebijakan, memastikan pemerataan akses, dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui intervensi regulatif, pendanaan, dan program strategis.

Di banyak negara, reformasi pendidikan menjadi fokus untuk memperkuat sumber daya manusia dan menciptakan masyarakat yang kompetitif. Pemerintah dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap perubahan teknologi, termasuk integrasi digital learning, penguatan literasi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran (OECD, 2023). Selain itu, kebijakan pendidikan juga harus mampu menjawab ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi, terutama di negara berkembang. Ketimpangan ini sering berkaitan dengan disparitas ekonomi, geografis, dan infrastruktur pendidikan (World Bank, 2022).

Secara global, berbagai negara telah mengadopsi pendekatan berbeda dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Finlandia, misalnya, menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang berfokus pada kesetaraan, kualitas guru, dan otonomi sekolah. Pemerintah Finlandia memastikan sistem pendidikan berjalan secara inklusif dan minim tekanan akademik, terbukti dari pencapaian hasil PISA yang stabil tinggi (Sahlberg, 2020). Jepang juga

memperkuat kebijakan pendidikan berbasis karakter, kedisiplinan, dan inovasi teknologi, sehingga mampu menjaga kualitas pembelajaran serta menghadapi tantangan perkembangan industri modern (MEXT Japan, 2021).

Jika dibandingkan, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan transformasi kebijakan pendidikan, terutama melalui implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas pembelajaran dan penguatan kompetensi siswa. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas melalui penguatan kompetensi guru, digitalisasi sekolah, serta penyediaan platform belajar seperti Merdeka Mengajar (Kemendikbudristek, 2022). Namun, tantangan seperti kesenjangan kualitas antarwilayah, keterbatasan sarana digital, dan belum meratanya kemampuan guru dalam mengadaptasi teknologi masih menjadi hambatan.

Pada level lebih khusus, efektivitas kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam merancang regulasi yang tepat sasaran serta memastikan implementasi berjalan secara konsisten. Dibanding negara maju, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal tata kelola pendidikan, pengawasan mutu, serta keberlanjutan program. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran pemerintah dan kebijakan pendidikan, khususnya dalam perspektif perbandingan internasional, menjadi penting untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi gap, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan global (Aziz & Sutanto, 2023).

Pemerintah berbagai negara juga mulai menekankan pentingnya tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Negara seperti Singapura mengedepankan sistem monitoring berbasis data untuk mengevaluasi kinerja sekolah dan guru secara berkelanjutan. Melalui kebijakan School Excellence Model (SEM), pemerintah Singapura menekankan inovasi, perbaikan berkelanjutan, serta budaya mutu sebagai landasan manajemen sekolah modern (Tan & Ng, 2020). Pendekatan ini memberikan gambaran bahwa pengawasan berbasis bukti (evidence-based governance) menjadi salah satu kunci keberhasilan reformasi pendidikan di tingkat global.

Lebih jauh, tantangan global terkait pemerataan pendidikan juga mendorong pemerintah untuk memperkuat inklusivitas. Di negara berkembang seperti India, pemerintah menerapkan kebijakan National Education Policy (NEP) 2020 yang menekankan penguatan literasi dasar, perluasan akses pendidikan prasekolah, serta modernisasi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan industri (Government of India, 2020). Kebijakan ini menunjukkan upaya serius negara berkembang dalam mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kapabilitas penduduknya untuk bersaing di tingkat internasional. Perbandingan ini memberikan perspektif bahwa negara-negara yang menghadapi tantangan struktural serupa melakukan reformasi yang menyoal kualitas, akses, dan relevansi kurikulum.

Selain itu, dinamika kebijakan pendidikan global juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi yang cepat. Negara-negara maju seperti Korea Selatan mendorong kebijakan Smart Education yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, termasuk penggunaan perangkat digital, jejaring sekolah pintar, dan integrasi konten berbasis kecerdasan buatan (Korean Ministry of Education, 2021). Upaya tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi, tetapi telah menjadi strategi utama pemerintah dalam meningkatkan daya saing pendidikan nasional. Di sisi lain, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital yang masih signifikan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Tantangan pemerataan kualitas pendidikan juga menemukan relevansinya dalam konteks global pasca-pandemi. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, memperkuat kebijakan pemulihan pembelajaran (learning recovery) melalui program pendanaan federal, peningkatan kapasitas guru, serta intervensi berbasis data untuk mengatasi learning loss (U.S. Department of Education, 2022). Langkah ini memberi gambaran bahwa peran pemerintah sangat sentral dalam mengurangi dampak krisis terhadap kualitas pendidikan. Indonesia pun menjalankan kebijakan serupa melalui program pemulihan pembelajaran dan implementasi Asesmen Nasional sebagai dasar evaluasi kualitas sekolah, meskipun efektivitasnya masih membutuhkan penguatan implementasi.

Dengan berbagai dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbandingan kebijakan pendidikan antarnegara memberikan gambaran berharga bagi Indonesia untuk memperkuat strategi nasional. Pembelajaran dari negara maju menunjukkan pentingnya konsistensi tata kelola, investasi jangka panjang, dan integrasi teknologi, sementara negara berkembang menekankan relevansi kurikulum dan pemerataan akses. Pemerintah Indonesia perlu mengadaptasi praktik baik tersebut sesuai konteks nasional, sekaligus memperkuat monitoring, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan profesionalisme guru sebagai garda terdepan keberhasilan pendidikan. Dengan demikian,

analisis komparatif terhadap peran pemerintah dalam kebijakan pendidikan menjadi landasan penting menuju transformasi pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan (Rahmawati & Prasetyo, 2023).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai peran pemerintah dan dinamika kebijakan pendidikan dalam perspektif perbandingan internasional memerlukan analisis teoritis yang mendalam terhadap berbagai literatur ilmiah. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengkaji teori-teori utama yang mendasari analisis kebijakan pendidikan, seperti teori tata kelola pendidikan, teori modernisasi, teori human capital, serta pendekatan kontekstual yang berfokus pada hubungan antara kebijakan pemerintah dan kualitas pendidikan di berbagai negara. Integrasi beragam sumber ilmiah ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pemerintah di negara maju maupun berkembang mengatur sistem pendidikan, menetapkan arah kebijakan, serta menentukan strategi peningkatan mutu pembelajaran, dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding ilmiah, serta laporan resmi lembaga pendidikan dunia seperti UNESCO, OECD, UNICEF, dan World Bank yang banyak membahas peran pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan. Dokumen kebijakan pendidikan nasional, termasuk laporan dan regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, turut dijadikan bahan pokok untuk memahami arah reformasi pendidikan Indonesia, seperti Kurikulum Merdeka, digitalisasi sekolah, serta kebijakan peningkatan kompetensi guru. Selain itu, data perbandingan kebijakan pendidikan antarnegara diperoleh dari laporan kebijakan pendidikan Finlandia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, India, dan Amerika Serikat, serta laporan analitis yang relevan dari situs resmi lembaga pendidikan masing-masing negara. Seluruh sumber dipilih secara ketat berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap analisis peran pemerintah dalam kebijakan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menghimpun dan menelaah dokumen tertulis yang berkaitan langsung dengan topik peran pemerintah dan kebijakan pendidikan komparatif. Semua literatur diklasifikasikan berdasarkan tema inti seperti strategi pemerataan akses pendidikan, kebijakan penguatan kualitas guru, pengembangan kurikulum nasional, kebijakan digitalisasi pembelajaran, tata kelola pendidikan, serta mekanisme pendanaan pendidikan. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis melalui penelusuran literatur, pencatatan informasi relevan, seleksi dokumen berdasarkan kualitas dan keilmiahan, serta pengorganisasian data sesuai kategori analisis yang telah ditentukan.

Subjek kajian dalam penelitian ini mencakup kebijakan pendidikan di beberapa negara maju—seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat—serta negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India. Pemilihan negara didasarkan pada perbedaan signifikan dalam hal struktur tata kelola, model kebijakan, standar mutu pendidikan, serta tingkat keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Keragaman konteks sosial, ekonomi, dan budaya dari negara-negara tersebut memberikan dasar kuat untuk membandingkan peran pemerintah dalam penyusunan kurikulum, manajemen guru, pembiayaan pendidikan, penerapan teknologi pembelajaran, hingga kebijakan pemerataan akses pendidikan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten (content analysis). Proses analisis dilakukan dengan membaca secara mendalam setiap literatur, mengelompokkan informasi berdasarkan tema terkait intervensi pemerintah, mengidentifikasi pola kebijakan yang berhasil maupun yang menghadapi hambatan, serta membandingkan model kebijakan antarnegara. Analisis komparatif ini bertujuan untuk menilai perbedaan dalam tata kelola pendidikan, efektivitas implementasi program pemerintah, strategi peningkatan kualitas guru, hingga dampak kebijakan terhadap pemerataan akses pendidikan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun rekomendasi yang relevan bagi penguatan kebijakan pendidikan Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan global.

Dalam proses analisis, peneliti melakukan beberapa tahap, mulai dari reduksi data untuk menyaring informasi inti terkait kebijakan pendidikan, klasifikasi tematik mengenai peran pemerintah dalam pendanaan, penyediaan infrastruktur, penguatan kurikulum, hingga digitalisasi pembelajaran. Temuan kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis guna memperkuat proses penarikan kesimpulan mengenai praktik terbaik (best practices) yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Indonesia. Uraian naratif ini

membantu memperjelas bagaimana negara lain mengelola sistem pendidikan dan bagaimana Indonesia dapat mengadopsi strategi serupa yang sesuai dengan kondisi nasional.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi kredibel seperti laporan kebijakan internasional, artikel ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Teknik ini memastikan bahwa data dan interpretasi yang dihasilkan memiliki validitas kuat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Triangulasi juga membantu mengurangi bias peneliti dan memastikan bahwa analisis perbandingan benar-benar mencerminkan kondisi riil kebijakan pendidikan di masing-masing negara.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini disusun untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah berperan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan, serta bagaimana model kebijakan antarnegara dapat dibandingkan secara ilmiah. Melalui prosedur penelitian yang sistematis dan analisis kritis berbasis literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah signifikan dan rekomendasi strategis bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan tata kelola, peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

### **3. Hasil dan Diskusi**

#### **1. Peran Pemerintah dalam Menata Sistem Pendidikan Nasional**

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam mengontrol arah, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan regulasi, menyediakan pendanaan, membangun infrastruktur, serta memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung sesuai standar mutu pendidikan nasional. Dalam lima tahun terakhir, fokus kebijakan pemerintah semakin diarahkan pada transformasi digital, reformasi kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru. Kebijakan-kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap tuntutan global yang menekankan literasi digital, kemampuan abad 21, serta kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 (Sari & Wahyudi, 2021).

Di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai terobosan seperti Kurikulum Merdeka, digitalisasi sekolah melalui Merdeka Mengajar, serta program peningkatan kompetensi guru. Kebijakan tersebut berupaya menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun tantangan masih muncul dalam hal ketimpangan fasilitas, kesiapan guru, serta variasi kualitas pendidikan antarwilayah (Prasojo & Nugroho, 2022).

#### **2. Efektivitas Kebijakan Kurikulum dan Implementasinya**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum memainkan peran signifikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Indonesia melalui Kurikulum Merdeka mengedepankan fleksibilitas, penguatan karakter, dan pembelajaran berbasis proyek. Implementasi kurikulum ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, dan kompetensi abad 21.

Meskipun demikian, implementasi kurikulum di lapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan guru, keterbatasan sarana teknologi, serta variasi kemampuan sekolah dalam melakukan inovasi pembelajaran (Rahmawati & Rusman, 2023). Dalam konteks global, negara-negara maju seperti Finlandia dan Korea Selatan telah lebih dahulu menerapkan kurikulum fleksibel berbasis kompetensi. Dibandingkan dengan Indonesia, kedua negara tersebut memiliki sistem pelatihan guru yang jauh lebih matang, budaya belajar yang mapan, serta dukungan teknologi yang lebih merata (Kim & Lee, 2021).

#### **3. Pemerataan Akses dan Keadilan dalam Pendidikan**

Pada aspek pemerataan, hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih menjadi isu penting di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah menyediakan berbagai bantuan seperti BOS, beasiswa afirmasi, dan perluasan akses sekolah, disparitas antara kota dan desa tetap tampak signifikan. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan kualitas infrastruktur pendidikan (Astuti & Widodo, 2020).

Dalam perbandingan global, negara seperti Kanada dan Finlandia telah mencapai tingkat pemerataan pendidikan yang tinggi melalui pendanaan yang berbasis kebutuhan (*needs-based funding*). Mereka menerapkan kebijakan yang memastikan setiap sekolah, terutama di wilayah terpencil, menerima dukungan yang memadai untuk peningkatan layanan pendidikan. Model ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pendanaan yang lebih adil dan berbasis kebutuhan daerah (Harris, 2022).

#### **4. Transformasi Digital dan Inovasi Pendidikan**

Digitalisasi menjadi salah satu fokus kebijakan pendidikan lima tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mengembangkan platform digital seperti Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, dan Siber Kreasi sebagai upaya memperkuat literasi digital serta mempermudah guru dan siswa mengakses sumber pembelajaran. Tantangan yang ditemukan adalah kemampuan adaptasi guru, ketersediaan perangkat teknologi, dan stabilitas jaringan internet terutama di daerah 3T (Siregar & Handayani, 2022).

Jika dibandingkan dengan Estonia—negara yang dianggap sebagai pelopor digitalisasi pendidikan—Indonesia masih tertinggal dalam hal integrasi sistem, kesiapan infrastruktur, serta tingkat literasi digital masyarakat. Estonia memiliki sistem digital terpadu yang menghubungkan sekolah, guru, siswa, dan pemerintah secara real time. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh investasi jangka panjang pemerintah dalam digitalisasi sejak awal tahun 2000-an (Valk & Sarapuu, 2021). Perbandingan ini menunjukkan perlunya Indonesia mempercepat pemerataan infrastruktur digital agar transformasi pendidikan berjalan optimal.

#### **5. Peningkatan Kompetensi Guru dan Profesionalisme Tenaga Pendidik**

Guru merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah Indonesia meningkatkan kompetensi guru melalui Platform Merdeka Mengajar, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta pelatihan berbasis *microlearning*. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kualitas guru antarwilayah, terutama karena ketimpangan akses pelatihan dan fasilitas belajar (Putri & Kurniawan, 2023).

Sementara itu, negara maju seperti Singapura dan Finlandia menerapkan sistem pendidikan guru yang jauh lebih terstruktur, dengan standar seleksi ketat, pelatihan kompetitif, dan sistem pengembangan profesional berkesinambungan. Guru di negara tersebut diposisikan sebagai profesi prestisius dengan dukungan penuh pemerintah dalam peningkatan kapasitas, sehingga menghasilkan mutu pembelajaran yang konsisten tinggi (Niemi & Hotulainen, 2021). Perbandingan ini menegaskan pentingnya Indonesia memperkuat sistem pelatihan guru yang lebih merata, komprehensif, dan berorientasi kompetensi.

#### **6. Kualitas Pembelajaran dan Hasil Belajar Siswa**

Evaluasi kualitas pembelajaran menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan dampak terhadap hasil belajar siswa, meskipun peningkatannya belum merata. Program seperti Asesmen Nasional, literasi numerasi, dan pembelajaran berbasis proyek menunjukkan tren positif terhadap kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Namun, laporan pendidikan nasional menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional dibanding negara-negara OECD (Wulandari & Fathurrohman, 2021).

Dalam tinjauan internasional, negara seperti Jepang dan Korea Selatan berhasil menjaga kualitas pembelajaran melalui budaya belajar yang kuat, dukungan pemerintah terhadap sekolah, serta kolaborasi intens antara guru, orang tua, dan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya dan sosial masyarakat agar implementasinya lebih efektif.

#### **7. Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Multisektor**

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari keberhasilan pendidikan. Pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas lokal. Namun tingkat keterlibatan masyarakat masih bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi (Hidayah & Lestari, 2023).

Negara seperti Finlandia dan Australia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pendidikan berdampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Keterlibatan orang tua dalam manajemen sekolah, penyusunan kurikulum lokal, dan kegiatan pembelajaran menjadi elemen penting dalam keberhasilan pendidikan.

## **8. Pendanaan Pendidikan dan Efisiensi Anggaran**

Pendanaan merupakan faktor penentu keberhasilan kebijakan pendidikan. Data menunjukkan bahwa Indonesia mengalokasikan sekitar 20% APBN untuk sektor pendidikan sesuai amanat undang-undang. Namun efisiensi distribusi anggaran sering menjadi masalah, khususnya pada sekolah-sekolah di daerah terpencil yang tidak mendapatkan dukungan optimal (Fauzan & Ahmad, 2022).

Perbandingan global memperlihatkan bahwa negara berkembang dengan kualitas pendidikan tinggi, seperti Vietnam, mampu memaksimalkan anggaran secara efisien dengan fokus pada peningkatan kapasitas guru dan fasilitas belajar. Negara maju seperti Norwegia dan Jepang menerapkan model pendanaan pendidikan berbasis kebutuhan sekolah, sehingga distribusi anggaran lebih adil dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran.

### **Diskusi**

Peran pemerintah dalam menata sistem pendidikan nasional menunjukkan posisi yang sangat strategis dalam memastikan arah, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Pemerintah secara aktif menetapkan regulasi, menyediakan pendanaan, membangun infrastruktur, serta mengawasi standar mutu pendidikan agar dapat menjawab tuntutan perkembangan abad ke-21. Dalam lima tahun terakhir, fokus kebijakan pendidikan Indonesia diarahkan pada transformasi digital, reformasi kurikulum, serta peningkatan kompetensi guru sebagai upaya menghadapi tantangan global seperti literasi digital, kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 (Sari & Wahyudi, 2021). Implementasi Kurikulum Merdeka, digitalisasi sekolah melalui platform Merdeka Mengajar, serta penguatan ekosistem pembelajaran menjadi langkah strategis pemerintah. Namun, berbagai tantangan masih muncul, terutama ketimpangan fasilitas belajar, kesiapan guru, serta perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah (Prasojo & Nugroho, 2022), sehingga efektivitas implementasi kebijakan tidak selalu merata.

Kebijakan kurikulum menjadi salah satu faktor kunci dalam membentuk kualitas pembelajaran di sekolah. Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan karakter diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan kompetensi abad 21 siswa. Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasinya menghadapi hambatan seperti kurangnya pelatihan guru, keterbatasan perangkat teknologi, serta variasi kemampuan sekolah dalam melakukan inovasi pembelajaran (Rahmawati & Rusman, 2023). Dalam perspektif perbandingan internasional, negara-negara maju seperti Finlandia dan Korea Selatan telah lebih dahulu menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan dukungan pelatihan guru yang mapan, budaya belajar yang kuat, serta infrastruktur pendidikan yang merata (Kim & Lee, 2021). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya integrasi antara desain kurikulum dan sistem pendukung implementasi agar kebijakan pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

Aspek pemerataan akses pendidikan juga menjadi isu penting dalam pembahasan sistem pendidikan nasional. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai bantuan seperti BOS, beasiswa afirmasi, serta perluasan akses pendidikan, ketimpangan pendidikan antara wilayah desa dan kota masih nyata. Faktor geografis, ekonomi, kualitas infrastruktur, dan ketersediaan sarana digital menjadi penyebab utama ketimpangan (Astuti & Widodo, 2020). Dalam perbandingan global, negara seperti Kanada dan Finlandia telah mencapai pemerataan yang tinggi melalui model pendanaan berbasis kebutuhan (*needs-based funding*), di mana sekolah di wilayah terpencil atau berpenghasilan rendah mendapatkan dukungan lebih besar (Harris, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas distribusi dan kesesuaian alokasi anggaran dengan kondisi lokal. Hal ini diperkuat dengan urgensi transformasi digital, di mana digitalisasi pembelajaran melalui Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, dan berbagai platform pendidikan masih menghadapi kendala perangkat dan jaringan—sesuatu yang telah lama dituntaskan oleh negara seperti Estonia melalui sistem digital terpadu sejak awal 2000-an (Valk & Sarapuu, 2021).

Peningkatan kualitas pendidik dan hasil belajar siswa juga menjadi topik sentral dalam diskusi transformasi pendidikan. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sejumlah program seperti Platform Merdeka Mengajar, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta *microlearning* berbasis digital untuk meningkatkan kapasitas guru. Namun kesenjangan kualitas guru antarwilayah masih terlihat akibat keterbatasan pelatihan dan sarana belajar (Putri & Kurniawan, 2023). Negara maju seperti Singapura dan Finlandia menunjukkan bahwa tata kelola guru yang baik—melalui seleksi ketat, pelatihan intensif, dan pengembangan profesional berkelanjutan—berkontribusi besar terhadap stabilitas mutu pembelajaran (Niemi & Hotulainen, 2021). Dampaknya terlihat pada hasil belajar siswa, di mana inovasi kebijakan seperti Asesmen Nasional telah menunjukkan tren positif dalam kemampuan literasi dan numerasi, tetapi pencapaian siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD (Wulandari & Fathurrohman, 2021). Pada sisi lain, partisipasi masyarakat dan kolaborasi multisektor, meskipun mulai tumbuh, masih dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Berbeda dengan Finlandia dan Australia yang memiliki partisipasi masyarakat tinggi dalam manajemen sekolah dan kurikulum lokal, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia cenderung kurang stabil (Hidayah & Lestari, 2023).

Aspek pendanaan pendidikan menjadi elemen terakhir namun krusial dalam diskusi hasil penelitian ini. Indonesia telah menetapkan alokasi 20% APBN untuk sektor pendidikan sesuai amanat undang-undang, tetapi efektivitas distribusi anggaran sering menjadi hambatan, terutama bagi sekolah di wilayah terpencil yang tidak memperoleh dukungan optimal (Fauzan & Ahmad, 2022). Perbandingan internasional menunjukkan bahwa efisiensi anggaran menjadi faktor penting, sebagaimana ditunjukkan oleh Vietnam yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan melalui alokasi anggaran yang fokus pada peningkatan kapasitas guru dan penyediaan fasilitas belajar inti. Negara maju seperti Norwegia dan Jepang juga menerapkan pendanaan berbasis kebutuhan sekolah sehingga distribusi lebih adil dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Temuan-temuan ini secara keseluruhan memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana pemerintah mengintegrasikan kebijakan kurikulum, pemerataan fasilitas, pelatihan guru, transformasi digital, dan kolaborasi masyarakat dalam satu ekosistem pendidikan yang saling menguatkan.

#### 4. Kesimpulan

Kajian perbandingan kebijakan pendidikan global menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam mengarahkan mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan abad ke-21. Negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan keberhasilan melalui tata kelola yang konsisten, investasi jangka panjang, kualitas guru tinggi, serta integrasi teknologi yang kuat. Sementara itu, negara berkembang seperti India dan Indonesia berupaya mengejar ketertinggalan melalui reformasi kurikulum, penguatan literasi dasar, digitalisasi sekolah, dan perluasan akses pendidikan. Namun, tantangan struktural seperti kesenjangan fasilitas, rendahnya pemerataan kualitas guru, dan ketimpangan wilayah masih menjadi hambatan signifikan bagi Indonesia. Kebijakan Indonesia seperti Kurikulum Merdeka dan digitalisasi pendidikan telah menunjukkan arah positif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan guru, dukungan infrastruktur, serta konsistensi implementasi kebijakan di lapangan. Perbandingan dengan praktik global menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh *governance* yang kuat, pendanaan yang berbasis kebutuhan, profesionalisasi guru, serta integrasi teknologi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat pengawasan mutu, meningkatkan kompetensi guru secara merata, memperluas infrastruktur digital, dan membangun kolaborasi multisektor untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing global. Kajian ini menegaskan bahwa analisis komparatif berperan penting sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan nasional yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

#### Referensi

1. Astuti, R., & Widodo, S. (2020). Pemerataan akses pendidikan di Indonesia: Tantangan dan strategi kebijakan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 12(2), 155–168.
2. Aziz, A., & Sutanto, R. (2023). Reformasi pendidikan dan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(1), 45–59.
3. Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Human Resource Development.
4. Harris, D. (2022). Equity-based school funding and its impact on education quality. *International Journal of Educational Policy*, 14(3), 201–219.
5. Kim, H., & Lee, S. (2021). Competency-based education reform in South Korea: Implications for developing countries. *Asian Education Review*, 9(1), 17–32.
6. Kemendikbudristek. (2022). *Laporan implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Korean Ministry of Education. (2021). *Smart education strategy for future learning*.
8. MEXT Japan. (2021). *Education in Japan 2021*. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

9. Niemi, H., & Hotulainen, R. (2021). Teacher professionalism in Finland: Strength, challenges, and future directions. *Nordic Journal of Education*, 41(2), 123–142.
10. OECD. (2023). *Education at a glance 2023*. OECD Publishing.
11. Prasajo, L., & Nugroho, A. (2022). Transformasi pendidikan digital di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(1), 45–56.
12. Putri, D., & Kurniawan, B. (2023). Pemerataan kompetensi guru dalam pembelajaran abad 21. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 3(2), 78–91.
13. Rahmawati, S., & Prasetyo, T. (2023). Analisis komparatif kebijakan pendidikan negara berkembang. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 11(1), 55–70.
14. Rahmawati, Y., & Rusman. (2023). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka: Perspektif guru. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 15(2), 134–148.
15. Sahlberg, P. (2020). *Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
16. Sari, M., & Wahyudi, A. (2021). Kebijakan pendidikan di era digital dan tuntutan kompetensi abad 21. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Pendidikan*, 6(1), 1–12.
17. Siregar, H., & Handayani, F. (2022). Adaptasi guru terhadap pembelajaran digital pasca pandemi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(3), 301–315.
18. Tan, C., & Ng, P. (2020). School excellence model in Singapore: An analysis of governance and school improvement. *Journal of Educational Management*, 18(4), 289–304.
19. UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*.
20. U.S. Department of Education. (2022). *Learning recovery guidebook*.
21. Valk, A., & Sarapuu, K. (2021). Digital transformation of education in Estonia. *European Journal of Digital Education*, 3(1), 88–102.
22. World Bank. (2022). *The state of global education: Trends and challenges*.
23. Wulandari, N., & Fathurrohman, M. (2021). Analisis hasil literasi dan numerasi siswa Indonesia berdasarkan asesmen internasional. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(2), 200–213.